

Praktik Pengembangan Program Perhutanan Sosial Sebagai Strategi Pelestarian Kawasan Hutan di Desa Yehembang Kangin

Farkha Alfa Centauri¹⁾, Tahsa Ayu Seva^{2)*}, Galang Alhaya Dinasti³⁾, Hendra Bagus Pamungkas⁴⁾

1) Supervisor HSSE PT Pertamina Patra Niaga AFT Ngurah Rai

2) *Community Development Officer* PT Pertamina Patra Niaga AFT Ngurah Rai

3) Supervisor Receiving & Storage PT Pertamina Patra Niaga AFT Ngurah Rai

4) Senior Supervisor Receiving & Storage PT Pertamina Patra Niaga AFT Ngurah Rai
tahsaseva@gmail.com

ABSTRACT

Along with the pace of development and economic growth in a region, it cannot be separated from various kinds of activities that are at risk of environmental destruction, one of which is forests. Where, this has concretely occurred in the increasing cases of encroachment on forest areas in Jembrana Regency. This encroachment was triggered by "ngawen" activities and illegal logging which caused environmental damage and loss of biodiversity. Here, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai plays a role in assisting the development of social forestry programs in Yehembang Kangin Village, Mendoyo District, Jembrana Regency, Bali Province to be able to increase public awareness of the importance of protecting forests and empowering the communities who are members of it. Banu Giri Lestari Forest Farmers Group in a sustainable manner. This research uses a descriptive qualitative approach supported by data collection techniques using purposive sampling. The results of the research show that the social forestry development program in Yehembang Kangin Village provides positive changes for the transformation of group behavior in forest conservation. Producing local heroes and their regeneration who are expected to be able to become agents of change in managing forests wisely and responsibly. Apart from that, the group has also been able to take the initiative in cultivating wood and fruit forest plants independently by practicing the "tanem tuwuh" pattern to support ecosystem sustainability and increase the diversity of flora and fauna in the forest.

Keywords: *Social Forestry; Biodiversity; CSR; Protected forest; Yehembang Kangin Village*

ABSTRAK

Seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, tidak terlepas dari berbagai macam aktivitas yang berisiko terhadap pengrusakan lingkungan yakni salah satunya terhadap hutan. Dimana, hal ini konkrit terjadi pada meningkatnya kasus perambahan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Jembrana. Perambahan tersebut dipicu oleh aktivitas "ngawen" dan *illegal logging* yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Disini, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai berperan dalam melakukan pendampingan pengembangan program perhutanan sosial di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan serta memberdayakan masyarakat yang tergabung ke dalam Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung dengan teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa program pengembangan perhutanan sosial di Desa Yehembang Kangin memberikan perubahan positif bagi transformasi perilaku kelompok dalam pelestarian hutan. Menghasilkan *local heroes* dan regenerasinya yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam pengelolaan hutan secara bijak dan bertanggungjawab. Selain itu, kelompok juga sudah mampu berinisiatif dalam membudidayakan tanaman hutan kayu dan buah-buahan secara mandiri dengan mempraktikkan pola "tanem tuwuh" demi mendukung kelestarian ekosistem dan peningkatan keberagaman flora-fauna di dalam hutan.

Kata kunci: Perhutanan Sosial; Keanekaragaman Hayati; CSR; Hutan Lindung; Desa Yehembang Kangin

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, laut, tambang, air, tanah, udara dan pariwisata yang mumpuni. Namun seiring perkembangan pembangunan wilayah, membuat kekayaan sumber daya alam tersebut mengalami kerentanan eksploitasi dan eksplorasi. Akibatnya kerusakan lingkungan hidup tidak bisa dihindarkan. Mengakibatkan terjadinya pemanasan global yang kemudian memicu terjadinya perubahan iklim (Kusmana, 2015). Fenomena laju deforestasi hutan pun kian bertambah, dimana Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki kerusakan hutan terbesar secara lingkup internasional. Sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2023, Indonesia mengalami kasus deforestasi terluas yaitu sebesar 30.8 juta Ha (research.wri.org, 2024). Mengakibatkan penyusutan keanekaragaman hayati sebagai dampak rusaknya hutan alam (Mangunjaya, 2006). LIPI juga menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara keenam dengan kepunahan biodiversitas terbanyak (National Geographic Indonesia, 2019)

Kerusakan hutan akibat laju deforestasi ini, juga terjadi di salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yaitu Jembrana. Kabupaten Jembrana tercatat memiliki luasan hutan terbesar kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan luas sebesar 41.351,27 Ha atau 31,61% dari luas total kawasan hutan di Pulau Bali (jembranakab.go.id, 2015). Namun, seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana tidak terlepas dari fenomena kerusakan hutan yang makin masif terjadi. Kerusakan hutan tersebut, terluas terjadi di Kecamatan Pekutatan seluas 6.129,29 Ha, disusul Kecamatan Mendoyo seluas 1.926,73 Ha, Kecamatan Melaya seluas 642,25 Ha, dan Kecamatan Negara seluas 302,00 Ha (Sundra, 2017). Menurunnya luasan kawasan hutan dan meningkatnya aktivitas merusak alam di Kabupaten Jembrana juga berdampak pada penurunan kuantitas keanekaragaman hayati (flora dan fauna). Kerusakan hutan tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya aktivitas *illegal logging* dan alih fungsi hutan menjadi area perkebunan.

Dengan demikian, dibutuhkan kerja sama antar pihak untuk dapat menjaga kelestarian hutan dengan mendukung upaya pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kawasan hutan yang berada di Kabupaten Jembrana secara teknis

berada dalam lingkup pengelolaan dan pengaturan kawasan serta hasil hutan di bawah pengawasan UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat (Novasari, 2023). UPTD. KPH Bali Barat memiliki kewajiban untuk dapat mengelola dan mengatur kawasan hutan beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Kolaborasi yang terjalin antara PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai bersama dengan UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat mulai terjalin sejak tahun 2023, dengan misi bersama untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan dan mengurangi aktivitas deforestasi khususnya di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Dengan demikian, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai melalui implementasi program CSR dan keanekaragaman hayati mulai membina Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari yang beranggotakan 58 orang sebagai petani hutan yang mengelola kebun dengan komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan difokuskan pada upaya pelestarian kawasan hutan, transformasi sosial pola pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penguatan kapasitas kelompok dan penataan kawasan perkebunan kelompok sebagai lokasi pengembangan agrowisata perhutanan sosial. Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari adalah salah satu organisasi masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan SK pengelolaan hutan melalui praktik perhutanan sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2018. Dimana, Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari diberikan amanah untuk dapat bertanggung jawab mengelola hutan lindung seluas 76,25 Ha di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Oleh karena itu, berdasarkan realitas di atas penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja strategi pelaksanaan pengembangan program perhutanan sosial sebagai upaya pelestarian kawasan hutan yang sudah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai di Desa Yehembang Kangin?

METODE PENELITIAN

Menguak praktik baik, perjalanan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan keanekaragaman hayati di kawasan perhutanan sosial Desa Yehembang Kangin. Perusahaan, berkolaborasi dengan beberapa *stakeholders* terkait seperti UPTD. KPH Bali Barat dan Pemerintah Desa Yehembang Kangin. Praktik pemberdayaan berbasis komunitas yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai adalah untuk menciptakan kemandirian sosial, ekonomi dan lingkungan bagi kelompok penerima manfaat program yaitu Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari. Konsep pemberdayaan sendiri, sudah muncul sejak manusia mengenal era perubahan dan pembangunan. Sehingga, dapat

diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (Habib, 2021).

Muncul dua premis yang mendasari lahirnya konsep “pemberdayaan” yaitu kegagalan dan harapan (Friedmann, 1992 dalam Bahri, 2013). Konsep pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses dan tujuan (Suharto, 2004 dalam Bahri, 2013). Sebagai proses pemberdayaan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat (Suharto, 2004 dalam Bahri, 2013). Sedangkan, pemberdayaan sebagai tujuan ialah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial (Suharto, 2004 dalam Bahri, 2013). Maka dari itu dalam proses pelaksanaan pemberdayaan dibutuhkan 3 tahapan penting berupa (Wrihatnolo, et.al, 2008 dalam Bahri, 2013) upaya penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai dalam mengimplementasikan pengembangan program perhutanan sosial di Desa Yehembang Kangin mengintegrasikan konsep pemberdayaan masyarakat dengan aktivitas pelestarian keanekaragaman hayati. Pengintegrasian implementasi pemberdayaan masyarakat dengan isu lingkungan dan konservasi sumber daya alam adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan praktik CSR (Nurjannah et al., 2017 dalam Lestari et al., 2022). Poin keanekaragaman hayati diusung sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan wilayah di Desa Yehembang Kangin agar lebih berkesinambungan. Keanekaragaman hayati sendiri menurut *World Wildlife Fund* adalah jutaan tumbuhan, hewan dan mikroorganisme termasuk yang mereka miliki serta ekosistem rumit yang mereka bentuk menjadi lingkungan hidup (Anggraini, 2018). Keanekaragaman hayati mencakup semua bentuk kehidupan di muka bumi, mulai dari makhluk sederhana seperti jamur dan bakteri hingga makhluk yang mampu berpikir seperti manusia (Sari et.al, 2022).

Penelitian ini dilakukan di kawasan perhutanan sosial Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang merupakan salah satu lokasi program CSR PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan *naturalistic inquiry* yang memerlukan manusia sebagai instrumen penelitian (Abdussamad et.al, 2021). Kualitatif deskriptif menjelaskan penelitian yang ada, tanpa memberikan manipulasi data variable yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung (Bahri, 2017 dalam Hanyfah et.al, 2022). Sekaligus, mengkaji peristiwa tindakan sosial yang alami menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu memecahkan masalahnya sendiri (Mohajan, Haradhan, 2018 dalam Yuliani, 2018). Informan kunci dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari, staf UPTD. KPH Bali Barat dan Kepala Desa Yehembang Kangin dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang bertumpu pada triangulasi data melalui serangkaian observasi partisipatif, wawancara mendalam dan analisis

dokumen (Marshall, & Rossman, 1999 dalam Fadli, 2021). Setelah itu, barulah data primer dan sekunder akan dianalisis melalui proses reduksi, penyajian dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perambahan hutan di Kabupaten Jembrana sudah lama terjadi, sejak krisis moneter tahun 1998 (Suriyani, 2019). Masyarakat mulai melakukan aktivitas “ngawen” atau merambah hutan untuk alih fungsi menjadi perkebunan dengan komoditas tanaman berumur pendek. Hal tersebut, juga diperparah dengan adanya aktivitas *illegal logging* kayu hutan, seperti yang terjadi di kawasan hutan Desa Yehembang Kangin. Dimana, beberapa masyarakat di Desa Yehembang Kangin pernah melakukan aktivitas patologis tersebut dengan salah satunya melakukan penebangan pohon bayur untuk kemudian dijual dan dimanfaatkan sebagai komoditas *furniture* serta bahan bangunan.

Pohon bayur dengan nama latin *Pterospermum javanicum* terkenal sebagai jenis pohon yang memiliki prospek komersial tinggi (Hidayat, 2014). Hal ini, dikarenakan batang kayu bayur dinilai kokoh dan kuat seperti kayu jati. Pohon bayur dapat ditemui di hutan hujan tropis Indonesia mulai dari wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, NTT dan Kalimantan (LindungiHutan, 2022). Pohon bayur ini, dipercaya mampu tumbuh hingga ketinggian mencapai ± 40 meter dengan diameter mencapai 120 cm (Kasmudjo et.al, 2006). Melansir dari data *IUCN Red List*, status konservasi pohon bayur berada di level risiko rendah, yang artinya pemanfaatan tanaman tersebut untuk kebutuhan komersial masih diizinkan oleh pemerintah (Khairi, 2021). Namun, aktivitas pembalakan liar hutan rakyat di Kabupaten Jembrana mulai mengalami intensitas penurunan. Hal ini, terjadi semenjak adanya maklumat sayembara yang digaungkan oleh Bupati Jembrana, bahwasanya akan memberikan hadiah senilai Rp2.000.000 bagi siapa saja yang mampu memberikan informasi terkait aktivitas *illegal logging* di hutan Kabupaten Jembrana (Suriyani, 2022).

Hal ini, dilakukan sebagai reaksi atas keprihatinan Bupati Jembrana setelah terjadinya bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang sempat terjadi di Kabupaten Jembrana pada tahun 2018 silam. Dimana bencana tersebut memberikan dampak kerusakan lebih besar daripada bencana banjir yang pernah terjadi sebelumnya. Tentunya fenomena bencana alam tersebut memunculkan keprihatinan dan kesadaran berbagai pihak bahwa ekosistem kawasan hulu perlu kita jaga. Menindaklanjuti hal tersebut, UPTD. KPH Bali Barat mengajak LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) untuk dapat membantu tugas instansi dalam melakukan pengawasan dan penjagaan kawasan hutan lindung di Kabupaten Jembrana.

Seruan tersebut, juga ditangkap oleh Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab. Anggota Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari dulunya sebelum tergabung ke dalam kelompok, pernah melakukan aktivitas perambahan hutan yang tidak ramah

lingkungan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu aktivitas tersebut mulai menurun, dimana masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga alam demi menunjang kelangsungan hidup mereka. Semangat untuk berubah inilah yang kemudian mendasari terbentuknya Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari beranggotakan 58 orang.

PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai adalah salah satu perusahaan BUMN yang tergabung dalam Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), di bawah unit operasional bisnis Aviasi area Jatimbalinus yang sudah lama beroperasi sejak tahun 1992. PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai berfokus pada operasional hilir bisnis yang bertanggung jawab terhadap konsumen maskapai penerbangan sipil maupun militer di area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam melayani kebutuhan bahan bakar penerbangan berupa avtur dan avgas.

Tergolong ke dalam perusahaan Perseroan Terbatas, mewajibkan PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai untuk menjalankan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai upaya kompensasi bisnis operasionalnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kewajiban tersebut, merujuk pada komitmen ketaatan perusahaan terhadap regulasi pemerintahan yang tertuang pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sekaligus, juga mempertimbangkan standar-standar yang tertuang dalam ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*, AA1000 *Stakeholder Engagement* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai upaya referensi pedoman dalam pelaksanaan strategi keberlanjutan operasional bisnis perusahaan melalui program-program CSR.

CSR atau yang lebih dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* merupakan representasi dari praktik baik perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penekanan akan pentingnya melaksanakan program CSR inilah yang kemudian menjadi strategi hukum untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat di atas kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai telah merumuskan sebuah kebijakan pelaksanaan CSR di internal perusahaan yang mencangkup wilayah sasaran pengembangan program di area Ring 1, 2 dan 3. Kebijakan tersebut, juga ditujukan sebagai pedoman dalam mengatur pembentukan program-program yang tidak hanya sebatas karitatif. Namun, mengarah kepada program-program yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, melalui kegiatan pemberdayaan, peningkatan kapasitas serta pelestarian alam.

PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai memiliki 8 program CSR, yang salah satunya berlokasi di wilayah pengembangan Ring 3

perusahaan yaitu di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, sebagai upaya penanganan perubahan iklim global dan upaya mereduksi efek gas rumah kaca. Oleh karena itu, perusahaan dalam merumuskan pelaksanaan program di Desa Yehembang Kangin dilakukan dengan langkah strategi penyadaran, pengkapisasian dan pendayaan kelompok penerima manfaat program. Sekaligus, diperkuat dengan aktivitas *bonding*, *bridging* dan perluasan jejaring relasi untuk mendukung eksistensi program.

Lokasi Desa Yehembang Kangin memiliki berbagai macam potensi keanekaragaman hayati yang berada di area RTK 19 Bali Barat kawasan hutan wilayah RPH Yeh Embang UPTD. KPH Bali Barat, yang menjadi lokasi kemitraan pengelolaan hutan perhutanan sosial antara Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari dengan UPTD. KPH Bali Barat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Tertuang dalam Perjanjian Kerja sama Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari dengan UPTD. KPH Bali Barat yang ditandatangani pada tanggal 19 September 2018 di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Hal tersebut, juga diperkuat dengan turunnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8879/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan.

UPTD. KPH Bali Barat memiliki peranan penting dalam mempertemukan PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai dengan Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari di tahun 2023. Dimana perusahaan langsung berkomitmen untuk melakukan pendampingan pengembangan keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat di lokasi tersebut. Komitmen ini tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pendampingan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Program Perhutanan Sosial Yehembang Kangin yang ditandatangani antara Aviation Fuel Terminal Manager Ngurah Rai dengan Perbekel Desa Yehembang Kangin, disaksikan oleh Bupati Jembrana, UPTD. KPH Bali Barat dan Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari. Hal tersebut, merupakan langkah awal komitmen perusahaan dalam mengikat (*bonding*) dan menjembatani (*bridging*) kepentingan bersama terhadap perlindungan pengelolaan kawasan hutan selama kurun waktu ± 5 tahun mendatang.

Perusahaan melakukan pendampingan terhadap Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari dengan memperkuat penyadaran akan pentingnya melestarikan kawasan hutan lindung dan keanekaragaman flora-fauna yang ada di dalamnya, melalui program pengembangan perhutanan sosial. Konsep perhutanan sosial sendiri menurut PP Nomor 23 Tahun 2021 adalah sebuah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial

budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Perusahaan memperkuat pendampingan program dengan rutinitas serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai media untuk menggali fakta terkait hambatan dan tantangan yang ada di masyarakat, supaya dapat diuraikan bersama melalui penetapan rencana kerja tahunan. Selanjutnya, perusahaan melakukan pengkapisitasan kepada kelompok dengan memperkenalkan praktik wanatani yang dikembangkan dalam kawasan perhutanan sosial, melalui pemilihan tanaman yang tidak berumur pendek seperti tanaman buah-buahan yaitu durian, jambu, kopi dan lain sebagainya. Kelembagaan kelompok pun juga akan diperkuat dari segi manajerial organisasi dan keuangan. Hal ini, dimaksudkan agar kohesivitas Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari dapat terjaga dalam memanfaatkan hasil hutan secara bijaksana dan bertanggungjawab selaras dengan ajaran Hindu “Tri Hita Karana”. Ajaran “Tri Hita Karana” adalah manifestasi perwujudan kebahagiaan manusia melalui hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan manusia (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan) (Setiawan, 2022). Dimana, manusialah yang menjadi titik sentral sekaligus subjek dalam pengimplementasian ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Ardana, 2023).

Sedangkan dari segi aspek pendayaan ekonomi, perusahaan mulai membangun infrastruktur Gudang HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) dimulai sejak tahun 2023 sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kelompok. Gudang HHBK memiliki fungsi sebagai sentral penyimpanan dan penjualan hasil panen anggota Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari. Harapannya, dengan adanya fasilitas gudang HHBK tersebut, kelompok mampu mengkoordinir aktivitas jual-beli hasil panen secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara tengkulak. Selanjutnya, di tahun kedua pendampingan program, perusahaan memperkuat *baseline study* dengan melaksanakan kajian riset keanekaragaman hayati yang bekerja sama bersama pihak konsultan dari PT Properindo Enviro Tech. Tujuannya adalah untuk dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan keanekaragaman flora-fauna di wilayah konservasi hutan lindung Desa Yehembang Kangin. Sekaligus, hasil *baseline study* tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai kumpulan data yang akan membantu perusahaan dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih berkesinambungan.

Menurut data Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) UPTD. KPH Bali Barat pada tahun 2022, disebutkan bahwa kawasan hutan lindung di bawah pengawasan instansi memiliki berbagai jenis keberagaman flora dan fauna di dalamnya. Setidaknya, teridentifikasi secara keseluruhan terdapat 204 jenis burung, 16 jenis herpetofauna dan 12 jenis mamalia. Populasi fauna tersebut, di beberapa jenis menurut UPTD. KPH Bali Barat akan terus menurun populasinya. Hal ini, dikarenakan sebagai akibat aktivitas pemburuan dan pembunuhan satwa yang dianggap mengganggu atau menjadi hama bagi masyarakat yang mengelola kebun /

tanaman pertanian. Sedangkan, khusus di kawasan RPH Yeh Embang terdapat 21 jenis flora yang tersebar hingga mencakup area hutan lindung Desa Yehembang Kangin, yaitu berupa tanaman kemiri, bayur, jati, nyantuh, gempinis, teep, kutat, dadap, juwet, tangi, pule, kejimas, kwanitan, hoo, iseh, gmelina, pisang, coklat, durian, mahoni dan salam. Selain itu, juga terdapat potensi sumber mata air di area hutan lindung Desa Yehembang Kangin yang menjadi sumber penghidupan air bersih bagi penduduk desa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Desa Yehembang Kangin, dimana keberadaan hutan adalah sumber kehidupan dan penyedia jasa lingkungan bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kolaborasi bersama antar *stakeholders* untuk dapat merangkul masyarakat yang masih melakukan aktivitas patologis merusak kawasan hutan, agar dapat tergabung ke dalam aksi gerakan pelestarian hutan yang terintegrasi ke dalam Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari. PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai dalam pendampingannya, juga mendorong terbentuknya *local heroes* dan regenerasinya sebagai *agent of change* swakelola hutan yang bijak dengan mempertahankan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Pengembangan program perhutanan sosial yang diimplementasikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai mendorong upaya reforestasi dan pengelolaan kawasan hutan berbasis pemberdayaan. Perusahaan telah memberikan bantuan bibit tanaman keras buah-buahan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 6.000 bibit kopi, 200 bibit pala, 200 bibit alpukat dan 200 bibit durian. Harapannya, dengan bantuan bibit tersebut dapat mengganti jenis tanaman kebun yang berumur pendek dan sekaligus juga menambah tutupan hutan di Desa Yehembang Kangin. Sehingga, hal tersebut juga mendukung akselerasi fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan dalam upaya pengendalian daur air. Disamping itu, Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari juga sudah memiliki inisiatif dalam melakukan penanaman kembali pohon kluwek dan kwanitan untuk mengembalikan tegakan pohon yang pernah di tebang sebelumnya. Kelompok juga telah menanam jenis tanaman durian, alpukat, manggis dan kemiri melalui pembenihan mandiri dengan pola penanaman "tanem tumbuh", yang artinya menanam sekali dapat dimanfaatkan hasilnya seumur hidup.

Selama proses pelaksanaan program, perusahaan terus mendorong dinamika penguatan modal sosial kelompok melalui serangkaian kegiatan pelibatan partisipasi aktif dan gotong royong untuk memperlancar implementasi pengembangan program di lapangan. Perusahaan juga mendorong kelompok untuk berani dan kritis dalam menyuarakan aspirasi ide dan gagasan mereka dalam menciptakan inovasi serta solusi alternatif selama pelaksanaan program. Sinergitas kolaborasi kerja sama antara perusahaan dan pemerintah setempat perlu dipertahankan untuk dapat mencapai pembangunan wilayah yang berkelanjutan dengan memperhatikan perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan perekonomian kelompok, peningkatan

kapasitas pengelolaan hutan yang madani dan praktik melindungi ekosistem hutan secara kolektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Desa Yehembang Kangin adalah salah satu desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang memiliki kawasan hutan lindung yang masuk ke dalam pengawasan dan perlindungan UPTD. KPH Bali Barat. Kawasan hutan lindung tersebut telah dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari berlandaskan acuan kesepakatan kerja sama kemitraan pengelolaan hutan berbasis praktik perhutanan sosial dengan UPTD. KPH Bali Barat sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Implementasi praktik perhutanan sosial ini, disinyalir sebagai solusi alternatif reforestasi dan pengelolaan kawasan hutan yang lebih berkelanjutan. Mengingat, bahwa secara umum kawasan hutan di Kabupaten Jembrana telah mengalami fenomena deforestasi akibat pembalakan liar dan “ngawen” yang sudah terjadi sejak tahun 1998. Dulunya, masyarakat Desa Yehembang Kangin sebelum tergabung ke dalam Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari pernah melakukan pembalakan liar kayu hutan yakni salah satunya pohon bayur. Pohon bayur ini kemudian dimanfaatkan sebagai komoditas utama bahan baku bangunan dan *furniture*.

Aksi tersebut, juga diperparah dengan adanya praktik “ngawen” atau merambah hutan untuk dijadikan perkebunan dengan komoditas tanaman berumur pendek. Namun, saat ini Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari sudah sadar akan pentingnya keberadaan hutan bagi kelangsungan hidup bersama, baik dari segi spiritual, lingkungan dan ekonomi. Sehingga, kelompok sudah mulai menerapkan aktivitas pola “tanem tuwuh” sebagai upaya mengonservasi lingkungan. Peran PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai sebagai perusahaan BUMN adalah melakukan pendampingan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap Kelompok Tani Hutan Banu Giri Lestari. Khususnya dalam hal pengembangan perhutanan sosial berbasis agrowisata dan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Hal ini, dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kualitas serta kuantitas keberagaman keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan hutan lindung Desa Yehembang Kangin dan sekaligus juga ingin meningkatkan kesejahteraan perekonomian kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anggraini, W. (2018). Keanekaragaman hayati dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Aktual*, 16(2), 99-106.
- Ardana, Gede. (2023). Menjaga Lingkungan Dengan Konsep Tri Hita Karana. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Diakses melalui

https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/80_menjaga-lingkungan-dengan-konsep-tri-hita-karana.

- Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Fam Publishing.
- Dislhc. (2019). Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya. Diakses melalui <https://dislhc.badungkab.go.id/artikel/18289-kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022, January). Penerapan metode kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash. In *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)* (Vol. 6, No. 1).
- Hidayat, S. (2014). Pola Sebaran dan Asosiasi Bayur (*Pterospermum javanicum* Jungh.) di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 11(3), 225-237.
- Kasmudjo et.al. (2006). Peluang Jenis Kayu Sungkai, Merawan dan Bayur Sebagai Bahan Baku Mebel dan Kerajinan. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (Mapeki) IX*, ISBN 979-96348-5-7.
- Khairi, Yuhan Al. (2021). Pohon Bayur, Penghasil Kayu Berkualitas Pengganti Jati. Diakses melalui <https://rb.gy/zy0i1t>.
- Kusmana, C. (2015). Makalah utama: keanekaragaman hayati (biodiversitas) sebagai elemen kunci ekosistem kota hijau. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*, 1(8), 1747-1755.
- Lestari, R., & Pradana, S. (2022). Konservasi Meranti dalam upaya Revitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Muka Kuning oleh PT Pertamina Patra Niaga DPPU Hang Nadim. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(11), 1447-1459.
- Mangunjaya, F. M. (2006). Hidup harmonis dengan alam: esai-esai pembangunan lingkungan, konservasi, dan keanekaragaman hayati Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- National Geographic Indonesia. (2019). Kepunahan Biodiversitas Tertinggi, Indonesia Peringkat Ke-6. Diakses melalui <https://nationalgeographic.grid.id/read/131833161/kepunahan-biodiversitas-tertinggi-indonesia-peringkat-ke-6>.

- Novasari, G. A. N. J., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2023). Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 178-183.
- Pemerintah Kabupaten Jembrana. (2015). Profil Kehutanan Jembrana. Diakses melalui <https://jembranakab.go.id/index.php?module=kehutanan>.
- Sari, M., Muamar, M. R., & Nur, F. M. (2022). Keanekaragaman Hayati.
- Setiawan, Eko. (2022). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Konservasi Taman Nasional Alas Purwo Berbasis Kearifan Lokal.
- Sundra, I Ketut. (2017). Kondisi dan Status Lingkungan Hidup di Kabupaten Jembrana. Diakses melalui https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/db83e97e9b5edd032344f1c034984ce3.pdf.
- Suriyani, Luh De. (2019). Menjaga Hutan, Memastikan Keberlangsungan Sumber Air Warga Jembrana [2]. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/08/14/menjaga-hutan-memastikan-keberlangsungan-sumber-air-warga-jembrana-2/>.
- Suriyani, Luh De. (2022). Hutan Gundul dan Pembalakan Liar: Muasal Banjir di Jembrana. Diakses melalui <https://projectmultatuli.org/hutan-gundul-dan-pembalakan-liar-muasal-banjir-di-jembrana/>.
- Syafar, M. (2015). Pemberdayaan Komunitas Majelis Taklim Di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 41-68.
- UPTD. KPH Bali Barat. (2022). Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).
- Widjanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.